

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.1.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Menurut Rasul (2002) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas menurut Lawton dan Rose (2004) dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan yang hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban mengelola organisasi.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No.589/IX/6/Y/99 dalam Sitompul (2003), akuntabilitas diartikan sebagai

kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu, pemberlakuan undang-undang otonomi daerah harus dapat meningkatkan daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas. Kualitas pemerintah daerah yang baik tidak hanya ditentukan oleh akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan supremasi hukum.

Jadi kesimpulan dari pengertian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.1.1.2. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5, Rasul (2002) yaitu :

- a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accuntability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum

menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

e. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana,

serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

2.1.1.3. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Aspek-aspek akuntabilitas menurut Modul Diklat Prajabatan Golongan III yaitu:

a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggungjawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di lain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggungjawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggungjawab antara kedua belah pihak.

b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results-oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability requires reporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is meaningless without consequences*)

Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggungjawab, dan tanggungjawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.

e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja.

2.1.1.4. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang terkait dengan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya melalui penyajian laporan keuangan, dimana

masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban (Rahayu, 2011) . Akuntabilitas publik Menurut Mahmudi (2010) adalah kewajiban pemerintah untuk melaporkan, mengelola sumber daya, dan mengungkapkan segala kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal). Akuntabilitas mengandung kewajiban untuk melaporkan dan menyajikan segala kegiatannya terutama di bidang administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Akuntabilitas publik mempunyai makna bahwa hasil dari suatu entitas ke dalam program, bentuk fungsinya dan kegiatan, maupun kebijakan suatu lembaga masyarakat dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (*public disclosure*), dan masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi tanpa hambatan.

Menurut Mardiasmo (2004) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu Akuntabilitas vertikal dan Akuntabilitas horizontal. Lebih lanjut jenis-jenis akuntabilitas publik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Berlaku bagi setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggaraan negara termasuk pemerintah. Dimana setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara hirarki berkewajiban

untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan langsungnya mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- b. Akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Melekat pada setiap lembaga negara sebagai satu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanat yang telah diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungannya.

2.1.1.5. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Menurut Halim (2013) Menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (Mulyana, 2006).

2.1.2. Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya disusun untuk memberitahukan informasi mengenai keadaan suatu perusahaan yang akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan selama setahun disajikan untuk memenuhi kebutuhan pihak intern perusahaan

maupun pihak ekstern perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangat berbeda dan berhak untuk memperoleh informasi keuangan. Laporan keuangan dipergunakan oleh manajemen puncak untuk dapat mengambil keputusan yang bermanfaat bagi perkembangan perusahaan sedangkan bagi investor laporan keuangan juga berguna dalam pengambilan keputusan, apakah ingin menanamkan saham atau tidak dalam perusahaan tersebut. Laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah : “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan keuangan lainnya yang diungkapkan oleh Munawir (2010): Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2013) tujuan dari laporan keuangan juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran dan indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, saldo anggaran lebih pendapatan-LO, beban, dan arus kas. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali:

- a. Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah.

2.1.3. Penyajian Laporan Keuangan

2.1.3.1. Pengertian Penyajian Laporan

Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik.

Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2002). Menurut PP No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut.

Jadi kesimpulan dari pengertian penyajian laporan keuangan adalah pengungkapan atas informasi yang mencantumkan suatu elemen dasar dari akuntabilitas yang dapat bermanfaat untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang ada dalam pemerintahan maupun perusahaan.

2.1.3.2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan

Tujuan penyajian laporan keuangan sektor publik menurut *Governmental Accounting Standard Board* (GASB, 1998) adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel secara publik;
- b. Untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Sementara itu, bila dilihat dari jenis laporan keuangan yang disusun pemerintah di daerah sampai saat ini telah mengalami dua perkembangan. Perkembangan pertama, Laporan keuangan yang harus disajikan secara lengkap pada akhir tahun oleh kepala daerah terdiri dari: Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Nota Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan.

Kerangka konseptual PP No. 71 tahun 2010 karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut yaitu:

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut :
 - a) Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b) Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c) Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d) Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.
2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu Informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama.
 4. Dapat dipahami, yaitu Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin baik penyajian laporan keuangan tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan akan disajikan dengan lengkap dan jujur dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan

nantinya akan mewujudkan akuntabilitas. Berarti semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Nordiawan, 2010). Tujuan penyajian laporan keuangan menurut Nordiawan (2010) adalah:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan.

Informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat menurut Diamond (2002) sebagai berikut:

- (a) meningkatkan akuntabilitas untuk para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) ketika mereka bertanggung jawab tidak hanya pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang mereka kelola
- (b) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang,

pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas

- (c) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban
- (d) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

2.1.4. Aksesibilitas Laporan Keuangan

2.1.4.1. Pengertian Aksesibilitas

Menurut Rohman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Disisi lain, Mulyana (2009) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Jadi kesimpulan dari pengertian aksesibilitas laporan keuangan adalah kemudahan masyarakat untuk mengelola keuangan publik dan masyarakat juga dapat berhak untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan pemerintah yang melakukan evaluasi terhadap pemerintah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa

informasi yang dimuat dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada stakeholder secara luas atas laporan keuangan yang dihasilkannya, misalnya dengan mempublikasikan laporan keuangan daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lainnya.

Informasi yang dimuat di dalam SIKD tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, mencakup:

- a. APBD dan laporan realisasi APBD provinsi, kabupaten dan kota
- b. Neraca daerah
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan daerah
- e. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
- f. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah
- g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah

berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan internet. Dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hasil dan kesimpulan:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel independen (X) dan Variabel dependen (Y)	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang (Anies IM, 2012)	Variabel independen (X): 1) Penyajian 2) Aksesibilitas Laporan keuangan Variabel dependen (Y): 1) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan	Hasil dari pengujian hipotesis di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah” pada Pemerintahan Kabupaten Badung (Putu Sri Wahyuni, dkk ,2014)	Variabel independen (X): 1) Penyajian Laporan Keuangan 2) Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel dependen (Y): 1) Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat) (Peggy Sande,2013)	Variabel independen (X): 1) Penyajian Laporan Keuangan 2) Aksesibilitas Laporan Keuangan Variabel dependen (Y): 1) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
---	---	--	--

Sumber: Anies Iqbal Mustofa (2012), Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Nyoman Trisna Herawati (2014), dan Peggy Sande (2013).

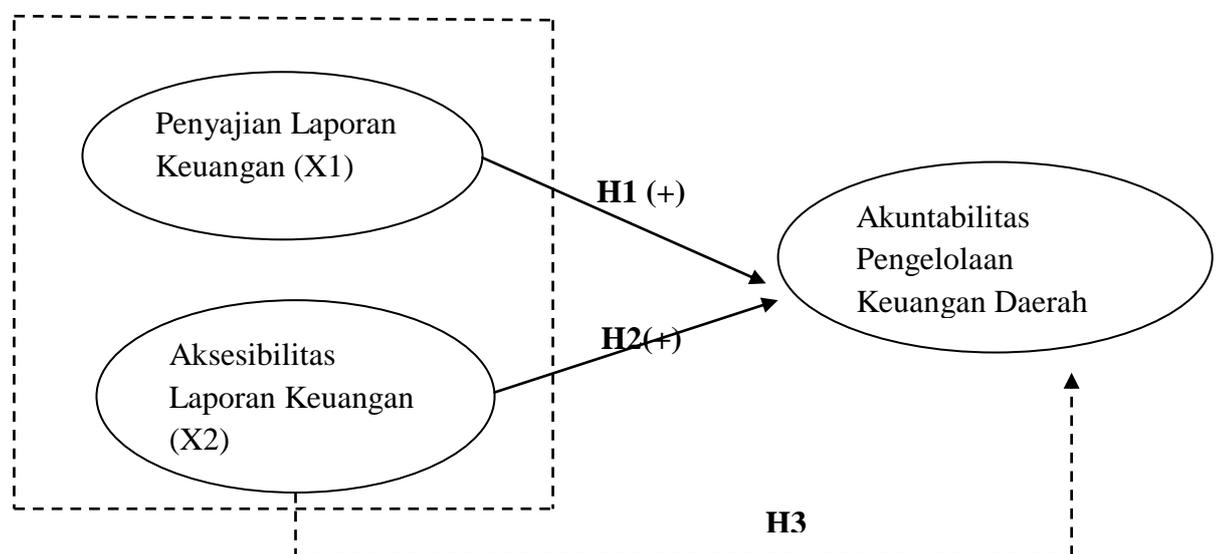
Penelitian ini mengacu pada penelitian Wahyuni,dkk (2014) dengan pengaruh penyajian laporan keuangan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian sebelumnya dan sekarang memiliki perbedaan yaitu pertama, penelitian ini dilakukan di DPRD dan LSM Kabupaten Jepara yang sebelumnya dilakukan di SKPD Kabupaten Badung. Kedua, penelitian ini menggunakan teknik *proporsionate stratified random sampling* sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik *purposive sampling*. Ketiga, penelitian ini mengambil sampel sebanyak 94 orang terdiri dari 50 orang anggota DPRD dan 44 orang pihak LSM sedang penelitian terdahulu peneneliti mengambil sampel sebanyak 35 SKPD yang terdiri dari 15 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekertariat, 1 RSUD, 4 Kantor, 6 Kecamatan jumlah sampelnya adalah 70 orang.

2.3.Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka dalam penelitian ini adalah pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak tiga variabel yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan yaitu, penyajian laporan keuangan (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan (X2). Sedangkan variabel terikat yang digunakan yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y). Kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4. Perumusan Hipotesis Penelitian

2.4.1. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010). Hubungan pemerintah seharusnya mampu memberikan pertanggungjawaban pada masyarakat dengan melalui laporan keuangan. terkait dengan penyajian laporan keuangan daerah, ditandai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah tersebut mengharuskan kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas: Laporan perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah. Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan akan meningkat.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Mustofa (2012), Wahyuni, dkk (2014) dan Sande (2013) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H1 : Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.4.2. Hubungan Aksesibilitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi yang mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apakah

artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik.

Hal tersebut didukung oleh penelitian Mustofa (2012), Wahyuni, dkk (2014) dan Sande (2013) menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah

2.4.3. Hubungan Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mardiasmo, 2009). Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Shende dan Bennet, 2004). Menurut Mardiasmo (2004) menyatakan bahwa

dengan terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Tuntutan pemerintah pusat yang mengharuskan setiap pelaporan keuangan pemerintah daerah harus terdapat Penyajian Laporan Keuangan Daerah hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2012), Wahyuni, dkk (2014) dan Sande (2013) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H3 : Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Secara Simultan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah